
ANALISIS GENDER DALAM PROGRAM NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KURAU

Atikah Dewi Utami

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

atikah.dewiutami@gmail.com

Received: 10-06-2023/Accepted: 18-12-2023/ Doi: <https://doi.org/10.32923/sci.v8i2.4682>

ABSTRACT

Gender Equality and Justice (KKG) with the main aim of increasing community participation, especially poor communities and women's groups. This research aims to analyze access and control of poverty alleviation programs in Kurau Village. Gender equality and justice, which is one of the development goals set out in the 2005-2025 RPJPN and outlined in the 2015-2019 RPJMN, is faced with three strategic issues, including increasing the quality of life and the role of women in development. This research uses quantitative methods with respondents in this research as many as 60 households divided into 30 men and 30 women with the unit of analysis in this research being individual households. The Spearman Rank correlation test is used to prove hypotheses in research with descriptive analysis referring to theory, observation results and in-depth interviews. The research results show that only income level and education level are significantly related to the level of access to program components. Furthermore, the level of income is negatively related to the level of control over program components at the level $\alpha = 0.20$ to $\alpha = 0.30$.

Keywords: *Gender Equality, Access, Control*

1. Pendahuluan

Prinsip kesetaraan merupakan komitmen utama dalam instrumen hak asasi manusia secara global. Namun, hak atas kesetaraan pada umumnya didefinisikan dalam istilah lain, yaitu hanya mengacu pada kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia tanpa pembedaan, diskriminasi, pengecualian, atau pembatasan atau atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun perempuan mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, mereka masih tertinggal jauh dalam banyak hal terutama sosial dan ekonomi (UN-Women, 2015). Oleh karena itu, dimensi pertama dari kesetaraan secara substantif dalam konteks perempuan adalah memperbaiki kelemahan yang terkait dengan gender. Dimensi kedua yaitu didasarkan pada konsep mendasar tentang martabat, yang bertujuan untuk mengatasi stigma, prasangka, penghinaan dan kekerasan. Dimensi ketiga mengakui bahwa hambatan terhadap kesetaraan berakar kuat pada struktur kelembagaan sosial. Daripada bertujuan untuk mencapai masa depan yang netral gender, yang mengharapkan perempuan untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang ditentukan oleh laki-laki, kesetaraan bagi perempuan harus bersifat transformatif, yang mencakup redistribusi kekuasaan dan sumber daya serta perubahan dalam struktur kelembagaan yang melanggengkan subordinasi perempuan (Fredman, 2003).

Kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025 dan dijabarkan di dalam RPJMN 2015-2019 dihadapkan pada tiga isu strategis, diantaranya meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Pemerintah Baru dalam menjalankan program prioritas atau yang disebut Quick Win,

menggunakan metodologi yang dipakai dalam melihat capaian dari kinerja Kabinet Kerja dengan ukuran dari prioritas setiap kementerian terkait dengan 10 Agenda Politik Perempuan, diantaranya adalah: hak atas pendidikan, kemiskinan Perempuan, dan hak atas pengelolaan lingkungan SDA, hak atas pekerjaan yang layak, serta penghapusan hukum diskriminatif. Selain itu, indikator kunci dalam pelaksanaan yang paling utama adalah komitmen pada pengarusutamaan gender (PUG).

Menurut RPJMN 2015-2019 (RPJMN 2015-2019) salah satu strategi peningkatan upaya keberlanjutan pembangunan sosial yaitu peningkatan kesetaraan gender untuk akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan keterwakilan perempuan dalam organisasi. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025 dan dijabarkan di dalam RPJMN 2015-2019 dihadapkan pada tiga isu strategis, diantaranya meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.

INPRES No 9 tahun 2000 perihal pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah menyatakan bahwa pengarusutamaan gender (PUG), bersamaan dengan pembangunan berkelanjutan dan *good governance* (tata kelola yang baik) merupakan tiga pilar dalam pembangunan nasional. Dalam proses pembangunan, PUG diartikan sebagai suatu strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Sasaran PUG antara lain adalah meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi serta akses terhadap sumberdaya.

Upaya mewujudkan hal tersebut pemerintah menyatakan bahwa pengarusutamaan gender (PUG), bersamaan dengan pembangunan berkelanjutan dan *good governance* (tata kelola yang baik) merupakan tiga pilar dalam pembangunan nasional. Dalam proses pembangunan, PUG diartikan sebagai suatu strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Sasaran PUG antara lain adalah meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi serta akses terhadap sumberdaya.

Gender menurut Fakih (2013) adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural yang berubah dari waktu ke waktu. Dalam memaknai gender, muncul perbedaan-perbedaan yang menyebabkan ketidakadilan bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Mosse (2007) mengemukakan bahwa gender adalah seperangkat peran yang, seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggungjawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles "peran gender" kita. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki sering dikaitkan dengan identitas gender yang tertanam dalam proses pengalaman belajar seumur hidup dan sebagai konsekuensinya

sering kali menjadikan perempuan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan laki-laki (Epstein, 1998) dalam (Quality, 2013).

Moser Dalam Mugnieszah (2007), mengemukakan tiga peranan gender (*triple roles*), yaitu (1) produktif (dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan untuk memperoleh bayaran di sektor formal dan informal), (2) reproduktif (tugas-tugas domestik, misalnya melahirkan, mengasuh anak, memasak, dan mengurus rumahtangga), (3) peranan pengelolaan masyarakat (kegiatan sosial/*volunteer*) dan politik (kekuasaan/status). Selanjutnya, Mugnieszah (1986) mengemukakan tingkat curahan waktu pemimpin wanita dalam pekerjaan rumah tangga (domestik) adalah banyaknya jumlah waktu yang digunakan pemimpin wanita dalam beragam kegiatan rumah tangga untuk waktu satu hari lalu. Adapun tingkat curahan waktu pemimpin wanita dalam pembangunan desa (publik) adalah banyaknya waktu yang digunakan pemimpin wanita dalam kegiatan mencari nafkah, kegiatan sosial dan pendidikan. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis sejauhmana kesetaraan gender (laki-laki dan perempuan) dalam pelaksanaan Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei, sementara pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Survei yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survei rumahtangga dan individu penerima program pembangunan dengan menggunakan kuisioner terstruktur. Survei rumahtangga peserta PNPM dilakukan untuk memperoleh data tentang profil rumahtangga peserta PNPM, terutama tentang aspek demografi, penguasaan lahan, aset kepemilikan benda berharga, serta partisipasi dalam beragam kelembagaan, baik formal maupun informal. Kuisioner ini mengidentifikasi sejauhmana rumahtangga mengetahui tentang program PNPM, kontrol yang dilakukan oleh istri dan suami dalam mengambil keputusan untuk mengikuti program, serta bagaimana partisipasi anggota rumahtangga dalam mengikuti program dan manfaat yang diperoleh dari mengikuti program tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer mencakup semua data variabel bebas (*independent variable*) dan variabel tidak bebas (*dependent variable*) sebagaimana disajikan dalam Gambar 1. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup semua data berkenaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PNPM, data kondisi umum lokasi penelitian khususnya monografi Desa Kurau (untuk mengetahui kondisi desa penelitian), serta buku dokumen infrastruktur desa.

Program SPSS *for windows* digunakan untuk menguji hipotesis kerja dalam penelitian ini, khususnya menggunakan metode statistik non parametrik Uji Korelasi Rank Spearman (*rs*) dengan pertimbangan bahwa variabel-variabel dependen dan independen dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal. Untuk interpretasi hasil uji statistik, digunakan interpretasi menurut Purnaningsih (2006), yaitu (1) signifikansi = 0.05, artinya berhubungan dan signifikan (mempengaruhi dan signifikan); (2) signifikansi = 0.10, artinya cukup berhubungan dan cukup signifikan (cukup mempengaruhi dan cukup signifikan); (3) signifikansi = 0.20 sampai 0.30, artinya kurang baik berhubungan dan tidak signifikan (kurang baik mempengaruhi dan tidak signifikan); dan (4) signifikansi > 0.30, artinya tidak baik berhubungan dan sangat tidak signifikan (tidak baik mempengaruhi dan sangat tidak signifikan). Pada literatur lain dikemukakan bahwa beberapa variabel penelitian oleh Uyanto (2009) dapat tergolong pada signifikansi = 0.00, artinya sangat berhubungan dan sangat signifikan (sangat mempengaruhi dan sangat signifikan).

3. Hasil

Menurut Surbakti dkk. (2001) dalam Mugniesyah (2007b) analisis gender merupakan langkah awal penyusunan tujuan pembangunan yang responsif gender. Analisis gender dilakukan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor utama guna mengidentifikasi ada tidaknya kesenjangan gender. Keempat faktor tersebut adalah:

1. Faktor akses untuk melihat akses antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh sumberdaya pembangunan.
2. Faktor kontrol untuk melihat kontrol atau kekuasaan laki-laki dan perempuan terhadap sumberdaya pembangunan.
3. Faktor partisipasi untuk melihat partisipasi laki-laki dan perempuan terhadap program-program pembangunan.
4. Faktor manfaat untuk melihat manfaat yang sama diperoleh laki-laki dan perempuan dari hasil pembangunan

Pelaksanaan Program Nasional Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kurau mulai dilaksanakan pada tahun 2009. Proyek pertamanya berupa pembuatan drainase di Dusun IV sepanjang 515 m atau tepatnya 2 x 2575 m (sisi kiri dan kanan). Pembangunan drainase ini dilatarbelakangi oleh beragam permasalahan yang ada di Desa Kurau yaitu kondisi saluran pembuangan air yang kurang kondusif sehingga sering terjadi genangan air apabila curah hujan tinggi. Sebagian besar warga mengeluhkan sebelum adanya pembangunan drainase tersebut, kondisi saluran pembuangan air di Desa Kurau tidak baik yaitu tidak mampu menampung air yang berlebihan pada saat hujan dan menghambat aktivitas masyarakat pada saat musim hujan.

Pembangunan drainase bertujuan untuk menyediakan saluran pembuangan air (got) yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya banjir pada saat hujan. Selain itu, baik secara langsung maupun tidak langsung pembangunan drainase ini diharapkan akan berdampak positif terhadap kenyamanan lingkungan di Desa Kurau. Sasaran dari program drainase ini adalah rumahtangga miskin, sebagian besar yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan drainase ini adalah laki-laki yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan dalam kategori usia produktif yaitu 15-60 tahun. Adapun jumlah masyarakat pemanfaat dari proyek drainase menurut pemanfaat dan jenis kelamin disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah pemanfaat proyek pembangunan drainase menurut kategori pemanfaat dan jenis Kelamin

Kategori Pemanfaat	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Pemanfaat Langsung Umum	464	48.38	355	44.60	819	46.67
Pemanfaat Rumahtangga Miskin	215	22.42	185	23.24	400	22.79
Pemanfaat Tidak Langsung	280	29.20	256	32.16	536	30.54
Total	959	100.00	796	100.00	1755	100.00

Sumber : Data diolah

Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) di Desa Kurau

Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) terdiri dari lima kelompok. Masing-masing anggota kelompok berdomisili di beberapa dusun yang ada di desa ini. Jumlah kelompok SPKP ini bertambah setiap tahunnya berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, jumlah keseluruhan kelompok SPKP yang ada di Desa Kurau sebanyak 14 kelompok. Masing-masing kelompok juga memiliki Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang mengatur penguatan kelompok. Kegiatan SPKP

merupakan kegiatan pemberian modal usaha untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, memberikan kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan untuk mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum perempuan. Sasaran dari program SPKP adalah rumah tangga miskin (RTM) yang produktif yang memerlukan pendanaan bagi kegiatan usaha dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) menggunakan sistem bantuan dana bergulir. Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penerima program SPKP bukan rumahtangga miskin. Kebanyakan penerima program SPKP adalah yang memiliki usaha dan ada beberapa merupakan bagian dari aparat desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, kelompok yang tergabung dalam SPKP telah melalui proses seleksi dari Tim Verifikasi yang kemudian dinyatakan layak tergabung dalam kegiatan SPKP. Adapun kelompok yang tidak berhak untuk mengajukan pinjaman SPP BLM atau perguliran, meliputi: Anggota TNI/POLRI, PNS, karyawan kecamatan, Kepala Desa/BPD, perangkat desa, karyawan BUMN, Purnawirawan TNI/POLRI, pensiunan PNS, kelompok laki-laki, pengusaha atau grosir. Sehubungan dengan hal itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah anggota yang merupakan bagian dari perangkat desa, yakni istri dari Ketua RT, istri dari seorang PNS, istri dari Kepala BPD dan seorang sekretaris BPD. Hal ini terjadi karena kurang tegasnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Fasilitator dan/atau Tim Verifikasi dan adanya hubungan kekerabatan atau kekuasaan yang dimiliki aparat desa tersebut sehingga luput dari pemeriksaan Tim Verifikasi.

Hasil penelitian Anggraini (2011) menunjukkan bahwa PNPM-P2KP merupakan program pemberdayaan perempuan berdasarkan tujuan khusus dalam Pedoman Umum Pelaksanaan PNPM-P2KP, akan tetapi keterlibatan perempuan masih tergolong rendah dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya, sejauhmana keterlibatan perempuan dalam program dianalisis menggunakan alat analisis gender yaitu akses dan kontrol terhadap pelaksanaan program. Variabel tingkat pendidikan diduga memiliki hubungan dengan variabel pengembalian pinjaman yang diasumsikan jika tingkat pendidikan tinggi maka tingkat pengembalian pinjaman juga tinggi. Besarnya pinjaman menggambarkan nominal uang yang diterima oleh anggota KSM setiap periode.

Tabel 2. Daftar nama kelompok Peserta SPKP

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Total Pinjaman Kelompok (x 1000)	Terendah (x 1000)	Tertinggi (x 1000)
1.	Mawar	5	20.000	5.000	4.000
2.	Rafflesia	10	93.000	5.000	10.000
3.	Anggrek	7	65.000	5.000	10.000
4.	Asoka	12	144.000	7.000	14.000
5.	Kamboja	7	46.000	4.000	7.000
6.	Seroja	7	66.000	7.000	10.000
7.	Tulip	6	54.000	7.000	10.000
8.	Matahari	6	12.000	2.000	2.000
9.	Melati Merah	6	34.000	4.000	6.000
10.	Melon	5	24.000	4.000	4.000
11.	Pelangi	11	132.000	12.000	12.000
12.	Mentari	5	10.000	2.000	2.000
13.	Mandiri	5	10.000	2.000	2.000
14.	Anggur	5	26.000	2.000	6.000

Sumber: Data diolah

Tabel 2 menyajikan data nama kelompok SPKP yang ada di Desa Kurau, yang meliputi 14 kelompok yang masih aktif dalam kegiatan SPKP dan tersebar di semua dusun desa ini. Keempat belas kelompok ini masing-masing memiliki pinjaman yang berbeda yang dimulai dari yang paling rendah sebesar Rp

2 000 000 s/d Rp 14 000 000. Angsuran kelompok dibayar setiap satu bulan sampai semua pinjaman dilunasi. Jenis usaha yang dilakukan oleh masing-masing kelompok adalah membuka warung kecil, membuat kerupuk ikan, menjual baju, dan membantu usaha suami.

Berdasarkan keempat belas kelompok diatas, ada beberapa kelompok yang menunggak pengembalian. Kesepakatan dari setiap kelompok adalah diberlakukannya sistem tanggung renteng apabila ada anggota kelompok yang telat melunasi pinjaman, tetapi menurut salah satu anggota kelompok bahwa kesepakatan sistem tanggung renteng dianggap memberatkan anggota kelompok lainnya. Selanjutnya, analisis pemenuhan kebutuhan praktis gender dalam penelitian ini juga dilihat dari tingkat manfaat yang diperoleh peserta PNPM khususnya pada peserta PNPM SPKP yang berkaitan dengan perkembangan usaha dan pendapatan peserta (Tabel 3).

Tabel 3 Jumlah dan Persentase Responden Peserta SPKP Berdasarkan Tingkat Perkembangan Usaha di Desa Kurau

No	Perkembangan Usaha	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Berkembang	10	33,33
2	Berkembang	20	66,67
Total		30	100

Sumber: Data diolah

4. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Karakteristik Sumberdaya Individu diduga berhubungan positif dengan Tingkat Akses dan Kontrol. Analisis selanjutnya dilakukan dengan melihat sejauhmana hubungan antara Tingkat Pendidikan Formal (X1) dan Status Bekerja (X2).

Tabel 4 Hubungan Karakteristik Sumberdaya Individu dengan Tingkat Akses dan Kontrol

Karakteristik Sumberdaya Individu	Tingkat Akses Peserta Sosial Dasar (Y1)				Tingkat Akses Peserta SPKP (Y1)			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1. Tingkat Pendidikan Formal (X4)								
Rendah	26,7	53,3	3,3	83,3	26,7	40,0	3,3	70,0
Sedang	3,3	3,3	3,3	10,00	3,3	13,3	13,3	30,0
Tinggi	3,3	3,3	0,00	6,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	33,3	60,0	6,7	100,00	33,3	53,3	16,7	100,0
2. Status Bekerja (X5)								
Rendah	30,0	23,3	6,7	60,0	16,7	16,7	0,0	33,3
Sedang	3,3	36,7	0,00	40,0	13,3	36,7	16,7	66,7
Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Total	33,3	60,0	6,7	100,00	30,0	53,3	16,7	100,0
	Tingkat Kontrol Peserta Sosial Dasar (Y2)				Tingkat Kontrol Peserta SPKP (Y1)			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1. Tingkat Pendidikan Formal (X4)								
Rendah	46,7	10,0	26,7	83,3	33,3	13,3	23,3	70,0
Sedang	3,3	0,00	6,7	10,00	20,0	0,00	10,0	30,0
Tinggi	3,3	3,3	0,00	6,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	53,3	13,3	33,3	100,00	53,3	13,3	33,3	100,0
2. Status Bekerja (X5)								
Rendah	26,7	10,0	23,3	60,0	20,0	3,3	10,0	33,3

Sedang	26,7	3,3	10,0	40,0	33,3	10,0	23,3	66,7
Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	53,3	13,3	33,3	100,00	53,3	13,3	33,3	100,0

Meskipun Tingkat Pendidikan Formal pada kedua kategori peserta PNPM keduanya tergolong rendah, namun Tingkat Akses terhadap Komponen program diantara kedua kategori tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan. Tingkat Akses pada Peserta Pembangunan Fisik mayoritas berada pada kategori sedang (60 persen), sedangkan pada Peserta SPKP mayoritas sama berada pada kategori sedang (53 persen). Meskipun mayoritas status bekerja pada Peserta Pembangunan Fisik tergolong rendah, namun diantara mereka ditemukan memiliki Akses terhadap Komponen program tergolong sedang. Sedangkan, pada Peserta SPKP mayoritas status bekerja berada pada kategori sedang dengan Tingkat Akses terhadap komponen program tergolong sedang. Tidak ditemukan adanya perbedaan Tingkat Akses pada kedua kategori Peserta diduga berhubungan dengan antusias masyarakat yang hanya biasa saja terhadap keikutsertaan dalam kegiatan sosialisai perencanaan awal yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Pada Peserta Pembangunan Fisik dengan Tingkat Akses yang sedang diduga karena sebagian besar peserta merasa tidak berkewajiban untuk hadir dalam setiap tahapan PNPM, sedangkan Pada Peserta SPKP dengan Tingkat Akses sedang diduga karena beberapa peserta adalah ibu rumahtangga yang hanya berperan sebagai anggota dalam kelompoknya dan merasa tidak berkewajiban untuk hadir dalam setiap tahapan program. Adapun Tingkat Akses yang tinggi adalah mereka yang berperan sebagai ketua, sekretaris dan bendahara dalam pelaksanaan program. Selanjutnya, pada Tingkat Kontrol untuk kedua Peserta tergolong rendah dengan status bekerja yang rendah. Hal ini didukung dengan fakta bahwa dalam proses pengambilan keputusan penentuan besarnya dana yang dikeluarkan ditentukan oleh pihak pengelola program.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini tidak menemukan adanya hubungan positif antara Tingkat Pendidikan Formal dengan Tingkat Akses dan Kontrol Peserta Pembangunan Fisik. Hal ini dimungkinkan terjadinya tidak terdapat hubungan karena berdasarkan fakta yang ada Tingkat Pendidikan Formal peserta penerima program di Desa Kurau cenderung homogen yaitu tergolong rendah. Dalam hal lain, ditemukan adanya hubungan yang cukup signifikan antara Status Bekerja dengan Tingkat Akses dan Kontrol. Hubungan Tingkat Pendidikan Formal dengan Tingkat Akses terhadap Komponen program pada Peserta Pembangunan Fisik yaitu $r_s=0,010$ pada taraf $\alpha=0,9$. Hubungan Status Bekerja dengan Tingkat Akses terhadap Komponen PNPM yaitu $r_s=0,309$ pada taraf $\alpha=0,09$. Hubungan Tingkat Pendidikan Formal dengan Tingkat Kontrol terhadap Komponen program Peserta Pembangunan Fisik yaitu $r_s=0,088$ pada taraf $\alpha=0,64$. Terdapat hubungan terbalik antara Status Bekerja dengan Tingkat Kontrol terhadap Komponen program Peserta Pembangunan Fisik yaitu $r_s= -0,201$ pada taraf $\alpha=0,28$.

Aspek keluaran program yang dilihat dalam penelitian ini salah satunya adalah variabel pemenuhan kebutuhan gender. Program Pembangunan di Desa Kurau diharapkan mampu memenuhi kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang menjadi alat ukur berhasil atau tidaknya suatu program disebut sebagai pemenuhan kebutuhan praktis gender, selanjutnya penyeteraan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan disebut dengan pemenuhan kebutuhan strategis gender.

Berdasarkan hal itu, analisis pemenuhan kebutuhan praktis gender dalam penelitian ini dilihat dari tingkat manfaat yang diperoleh peserta program pembangunan khususnya yang berkaitan dengan perkembangan usaha dan pendapatan peserta. Terdapat perbedaan manfaat yang diterima dalam hal tingkat perkembangan usaha yang dirasakan dari adanya pembangunan ini diantaranya dapat menunjang aktivitas masyarakat setempat. Hal ini dirasakan oleh pedagang warung yang membuka warung disekitar.

Adapun, manfaat yang diperoleh dari Peserta program pembangunan dengan adanya stimulan dana bergulir bagi kelompok perempuan. Peserta menggunakan dana bergulir tersebut untuk modal usaha baru dan sebagian peserta menggunakannya untuk meningkatkan usaha yang sudah ada yakni dengan menambah jumlah dan macam barang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa program telah mampu memenuhi

kebutuhan praktis peserta. Namun hal tersebut belum sepenuhnya menggambarkan peningkatan kesejahteraan peserta yang mengikuti program. Selanjutnya, perlu dilihat sejauhmana program mampu memenuhi kebutuhan strategis gender, yakni mampu mengubah status kedudukan perempuan dalam rumahtangga agar setara dengan laki-laki setelah mengikuti program. Pemenuhan kebutuhan strategis gender pada penelitian ini dilihat dari kontrol peserta dalam hal pengambilan keputusan serta partisipasi peserta dalam mengikuti program pembangunan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aspek keluaran program yang dilihat dalam penelitian ini salah satunya adalah variabel pemenuhan kebutuhan gender. Program Pembangunan di Desa Kurau diharapkan mampu memenuhi kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang menjadi alat ukur berhasil atau tidaknya suatu program disebut sebagai pemenuhan kebutuhan praktis gender, selanjutnya penyetaraan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan disebut dengan pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kegiatan program pembangunan di Desa Kurau belum mampu memenuhi kebutuhan strategis gender, hal ini karena tidak terjadi perubahan kebutuhan strategis gender setelah mengikuti program SPKP. Setelah mengikuti program dan menerima dana pinjaman, perempuan belum mampu menjadi pengambil keputusan di dalam keluarga, kecuali dalam hal yang berhubungan dengan urusan rumahtangga. Kedudukan posisi perempuan tetap pada mengurus rumahtangga saja. Program ini belum mencerminkan prinsip KKG yang didalamnya memuat bahwa perempuan bisa saja menjadi pengambil keputusan dalam keluarga. Tingkat Akses pada Peserta Pembangunan Fisik mayoritas berada pada kategori sedang (60 persen), sedangkan pada Peserta SPKP mayoritas sama berada pada kategori sedang (53 persen). Tingkat Kontrol untuk kedua Peserta tergolong rendah dengan status bekerja yang rendah. Hal ini didukung dengan fakta bahwa dalam proses pengambilan keputusan penentuan besarnya dana yang dikeluarkan ditentukan oleh pihak pengelola program.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A. (2011). Pemberdayaan Perempuan Melalui PNPM-P2KP (Kasus: KSM Ekonomi Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat). [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Fakih M. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Mugniesyah SS *et al.* (2001). Analisis Gender dalam Pembangunan Pertanian Aplikasi *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bekerjasama dengan *Women's Support Project II-CIDA*. Jakarta (ID)
- Mugniesyah SS. (2006). Materi Bahan Ajar Komunikasi Gender. Bogor [ID]: Sains KPM IPB Press.
- Mugniesyah SS. (2007). Gender, Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Adiwibowo S, editor. *Ekologi Manusia*. Bogor (ID): IPB. 446 Hal.
- Muhtadi S. (2013). Filsafat Komunikasi. Jakarta (ID): CV PUSTAKA SETIA
- Purnaningsih N. (2006). Adopsi inovasi kemitraan agribisnis sayuran di Provinsi Jawa Barat. [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Rancangan Awal Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Jakarta.
- Fredman, S. (2003). *Beyond the Dichotomy of Formal and Substantive Equality: Towards a New*

Definition of Equal Rights.” In Temporary Special Measures. I. Boerefijn and others (Eds.). Antwerp: Intersentia. *Antwerp: Intersentia*.

Quality, E. I. for G. (2013). *Gender Equality Index Report*. <https://doi.org/10.2839/9948>

UN-Women. (2015). *Gender Equality and Human Rights (Discussion Paper for the Progress of the World's Women 2015-2016)* (Issue 4). <http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/goldblatt-fin.pdf?la=en&vs=1627>

Uyanto SS. (2009). *Pedoman analisis data dengan SPSS*. Yogyakarta (ID): Graha Ilmu.

Quality, E. I. for G. (2013). *Gender Equality Index Report*. <https://doi.org/10.2839/99>